



Jurnal Gereja

"Caeli enarrant gloriam Dei"

URL : <http://jurnal.sttekklesia.ac.id>

e-ISSN : -

Edition : Jurnal Gereja, Volume 3, Nomor 1, Des. 2026

Page : 49 - 89

Kajian Sosiologis dan Alkitabiah Terhadap Film Dokumenter "Pesta Babi"

Ebenezer Sianturi

Pembangunan pada hakikatnya merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Namun, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Melalui analisis sosiologis dan refleksi Alkitabiah terhadap film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*, artikel ini mengupayakan untuk menawarkan perspektif yang lebih dialogis, kritis, dan bertujuan membangun bagi pembangunan Papua Selatan yang lebih baik.

Kata kunci
Pembangunan, kritik seni, film dokumenter, sosiologi, Pesta Babi, pengrusakan lingkungan, transformasi karakter, Papua Selatan.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menempatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai prioritas strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, ketidakpastian rantai pasok internasional, serta ancaman krisis pangan dan energi di masa depan. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan berskala besar terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mewujudkan agenda tersebut adalah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks Papua Selatan, berbagai program pengembangan pangan, industri gula, bioetanol, serta pembangunan infrastruktur pendukung ditempatkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi Indonesia.

Kehadiran PSN di Papua Selatan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki posisi yang penting dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya sebagai salah satu kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Namun demikian, pembangunan berskala besar pada praktiknya tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi, tetapi juga dapat memunculkan berbagai dinamika sosial, budaya, dan lingkungan.

Dalam konteks masyarakat adat Papua, tanah dan hutan tidak semata-mata dipahami sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai bagian dari identitas budaya, warisan leluhur, serta ruang hidup yang menopang keberlangsungan komunitas. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi pada ruang hidup masyarakat adat sering kali tidak hanya dipahami sebagai persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan budaya, relasi sosial, dan hak-hak masyarakat adat.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan kemudian memunculkan berbagai respons dari beragam pihak. Pemerintah memandang pembangunan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepentingan nasional. Di sisi lain, sebagian masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan berbagai kekhawatiran mengenai dampak sosial, ekologis, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses sosial yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda.

Salah satu respons kritis terhadap pelaksanaan PSN di Papua Selatan hadir melalui film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*. Film ini menampilkan pengalaman dan suara sebagian masyarakat adat Papua yang merasakan perubahan besar dalam ruang hidup mereka akibat masuknya berbagai proyek pembangunan berskala besar. Melalui pendekatan dokumenter investigatif, film tersebut membangun narasi bahwa pembangunan yang berlangsung di Papua Selatan memiliki keterkaitan dengan persoalan keadilan sosial, lingkungan hidup, serta relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Sebagai sebuah karya dokumenter, film ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai representasi sosial yang menghadirkan sudut pandang tertentu terhadap realitas pembangunan.

Meskipun demikian, berbagai narasi yang muncul dalam film tersebut perlu dibaca secara kritis dan seimbang. Film dokumenter bukanlah reproduksi realitas secara mutlak, melainkan sebuah konstruksi naratif yang dibangun berdasarkan perspektif tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya melihat persoalan dari satu sudut pandang, tetapi juga berupaya memahami dinamika yang terjadi melalui pendekatan akademik yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis berbagai dinamika sosial yang muncul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan, termasuk relasi antaraktor, persoalan identitas budaya, partisipasi masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu, perspektif Alkitabiah digunakan untuk merefleksikan isu pembangunan, keadilan sosial, martabat manusia, dan tanggung jawab terhadap ciptaan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Suci. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai relasi antara pembangunan nasional, masyarakat adat, dan nilai-nilai iman Kristen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang bahwa kajian mengenai Proyek Strategis Nasional dan hak masyarakat adat Papua melalui tinjauan sosiologis dan Alkitabiah terhadap film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*, memiliki relevansi akademik maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai pembangunan, masyarakat adat, dan refleksi teologis Kristen terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai sumber tertulis dan audiovisual yang berkaitan dengan tema penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Melalui studi pustaka, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara pembangunan, masyarakat adat, dan refleksi teologis Kristen terhadap persoalan sosial yang muncul di Papua Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas berbagai literatur akademik, buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga masyarakat sipil, serta berbagai sumber pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* digunakan sebagai objek kajian utama untuk melihat bagaimana persoalan pembangunan dan masyarakat adat direpresentasikan melalui media dokumenter.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, dan berbagai dinamika yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan.

Sementara itu, analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung di dalam representasi film serta merefleksikannya melalui pendekatan sosiologis dan teologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara pembangunan nasional, masyarakat adat, dan nilai-nilai Alkitabiah.

Hasil dan pembahasan

Papua Selatan sebagai Ruang Sosial dan Ekologis

Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu provinsi otonom baru yang dibentuk dalam rangka kebijakan pemekaran wilayah di Papua melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.¹ Provinsi ini secara resmi disahkan pada tahun 2022 dengan ibu kota berada di Kabupaten Merauke. Pembentukan provinsi baru tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayah Papua.²

Secara administratif, Provinsi Papua Selatan meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.³ Dengan luas wilayah sekitar 117.849 km², Papua Selatan menjadi salah satu provinsi dengan cakupan wilayah yang sangat luas di Indonesia.⁴ Karakter geografisnya didominasi oleh dataran rendah, rawa-rawa, kawasan pesisir, serta bentang savana yang berbeda dengan sebagian besar wilayah pegunungan di Papua bagian tengah.

Posisi Merauke dalam Konteks Papua

Kabupaten Merauke memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Selain dikenal sebagai wilayah paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Merauke juga memiliki hamparan lahan datar yang luas sehingga sejak lama dipandang memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan pangan.⁵

Perhatian pemerintah terhadap Merauke sebagai kawasan pengembangan pangan sebenarnya bukan hal yang baru. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wilayah ini pernah menjadi lokasi program Merauke Integrated Food and

Energy Estate (MIFEE) yang diluncurkan pada tahun 2010.⁶ Dalam perkembangan berikutnya, Merauke kembali menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah melalui berbagai program strategis nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pengembangan tebu, serta industri bioenergi.

Posisi strategis tersebut menjadikan Merauke tidak hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga memiliki arti penting dalam konteks pembangunan nasional. Di satu sisi, wilayah ini dipandang sebagai salah satu kawasan potensial untuk mendukung swasembada pangan dan energi.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

² Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

³ Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Profil Provinsi Papua Selatan (Merauke: Pemprov Papua Selatan, 2023).

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2024 (Merauke: BPS Papua Selatan, 2024).

Namun di sisi lain, keberadaan berbagai proyek pembangunan berskala besar juga membawa konsekuensi sosial, budaya, dan ekologis yang memerlukan perhatian yang serius.

Keberagaman Masyarakat Adat di Papua Selatan

Papua Selatan merupakan ruang hidup bagi berbagai kelompok masyarakat adat yang telah menempati wilayah tersebut jauh sebelum terbentuknya negara modern Indonesia.

Salah satu kelompok adat terbesar di Merauke adalah masyarakat Marind, yang secara historis memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah, hutan, sungai, dan berbagai sumber daya alam di sekitarnya.⁷

Selain masyarakat Marind, wilayah Papua Selatan juga dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat lainnya, antara lain Kanum, Yei, Maklew, Khimaima, Muyu, Mandobo, Kombai, Korowai, Asmat, dan sejumlah kelompok etnis lainnya yang tersebar di empat kabupaten tersebut.⁸ Setiap komunitas memiliki struktur sosial, sistem kekerabatan, serta hubungan budaya yang khas dengan wilayah adat masing-masing.

Dalam banyak masyarakat adat Papua, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kolektif dan warisan leluhur. Hubungan tersebut membentuk sistem kehidupan yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁹

Karakter Ekologis Papua Selatan

Papua Selatan merupakan salah satu kawasan dengan kekayaan ekologi yang sangat penting di Indonesia. Bentang alam wilayah ini mencakup hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa, kawasan mangrove, padang savana, serta berbagai ekosistem lahan basah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.¹⁰

Kabupaten Asmat dan Mappi dikenal memiliki kawasan rawa dan gambut yang luas, sementara Merauke memiliki kombinasi antara hutan rawa, savana tropis, dan kawasan pesisir yang menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna endemik Papua.¹¹

Selain itu, Papua secara umum merupakan salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai jenis tumbuhan, burung, mamalia,

reptil, dan sumber daya perairan menjadi bagian penting dari ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat lokal.¹²

Salah satu sumber daya yang memiliki arti penting bagi masyarakat Papua Selatan adalah pohon sagu (*Metroxylon sagu*). Sagu bukan hanya sumber pangan tradisional, tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.¹³

Bagi banyak komunitas adat di Papua, keberadaan hutan sagu berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Tanah dan Hutan sebagai Ruang Kehidupan Masyarakat Adat

Berbagai penelitian antropologis menunjukkan bahwa masyarakat adat Papua memandang tanah dalam makna yang lebih luas daripada sekadar faktor produksi ekonomi.¹⁴ Tanah merupakan ruang hidup yang menghubungkan masyarakat dengan sejarah leluhur, identitas budaya, serta keberlangsungan komunitas.

Demikian pula, hutan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Papua Selatan. Hutan menyediakan bahan pangan, bahan bangunan, obat-obatan tradisional, serta berbagai kebutuhan hidup lainnya. Dalam banyak komunitas adat, hutan

juga menjadi ruang sosial dan simbol keberlanjutan hubungan antara manusia dengan alam.

Pandangan tersebut sering dirumuskan dalam ungkapan yang berkembang di berbagai komunitas Papua bahwa "**tanah adalah mama**" atau "**hutan adalah ibu**". Ungkapan tersebut menggambarkan hubungan emosional dan simbolik yang sangat kuat antara masyarakat adat dengan lingkungan tempat mereka hidup.¹⁵

Karena itu, perubahan yang terjadi pada ruang hidup masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai perubahan ekonomi semata, tetapi juga dapat memengaruhi dimensi sosial, budaya, dan identitas komunitas. Pemahaman mengenai karakter sosial dan ekologis Papua Selatan ini menjadi penting untuk memahami berbagai dinamika yang muncul seiring dengan masuknya berbagai program pembangunan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, Papua Selatan tidak hanya dapat dipahami sebagai wilayah administratif atau kawasan yang memiliki potensi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekologis yang dihuni oleh komunitas-komunitas adat dengan sejarah, budaya, dan hubungan yang khas terhadap tanah serta lingkungan hidup mereka. Perspektif ini

penting sebagai landasan untuk memahami berbagai dinamika pembangunan yang akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya.

DISKUSI: KAJIAN ALKITABIAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN HAK MASYARAKAT ADAT

Landasan Teologis

Pembahasan mengenai pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan relasi manusia dengan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pandangan teologis tentang siapa pemilik bumi dan bagaimana posisi manusia di dalam ciptaan. Dalam perspektif Alkitab, bumi bukan milik manusia secara mutlak, melainkan milik Tuhan sebagai Pencipta dan Pemilik seluruh ciptaan. Oleh karena itu, manusia menerima mandat untuk mengelola dunia sebagai wakil Tuhan di bumi (*stewardship*), bukan sebagai pemilik absolut yang bebas memperlakukan ciptaan menurut kehendaknya sendiri.

Tuhan sebagai Pemilik Seluruh Bumi

Kesaksian Alkitab secara konsisten menegaskan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. **Mazmur 24:1** menyatakan: "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya."

Demikian pula **Mazmur 50:10-12** menunjukkan bahwa seluruh ciptaan berada di bawah kedaulatan Tuhan: "sebab punya-Kulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa-Ku. Jika Aku lapar, tidak usah Kukatakan kepadamu, sebab punya-Kulah dunia dan segala isinya."

Prinsip ini memiliki implikasi teologis yang penting. Karena bumi adalah milik Allah, maka tidak ada individu, kelompok, perusahaan, maupun negara yang memiliki hak absolut atas bumi. Seluruh manusia pada hakikatnya hanyalah penerima mandat untuk mengelola ciptaan Tuhan secara bertanggung jawab.

Christopher J. H. Wright menyatakan bahwa kepemilikan Tuhan atas bumi menjadi dasar etika sosial dan ekonomi dalam Alkitab, sebab seluruh aktivitas manusia harus dilakukan dalam kesadaran bahwa manusia bertanggung jawab kepada Sang Pemilik sejati.¹³⁶

Mandat Budaya : Mengusahakan dan Memelihara Ciptaan

Sejak awal penciptaan, Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia untuk dikelola.

Dalam **Kejadian 1:28** Tuhan memerintahkan manusia: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,..."

Perintah ini sering disebut sebagai mandat budaya (cultural mandate), yaitu panggilan Tuhan kepada manusia untuk mengembangkan kehidupan, membangun peradaban, dan memanfaatkan sumber daya ciptaan bagi kesejahteraan bersama.¹³⁷

Namun mandat tersebut tidak dapat dipisahkan dari **Kejadian 2:15**: "TUHAN mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu."

Kata Ibrani 'ābad ("mengusahakan") mengandung arti bekerja, mengelola, atau melayani, sedangkan kata šāmar ("memelihara") berarti menjaga, melindungi, atau merawat.¹³⁸ Dengan demikian, manusia dipanggil bukan hanya untuk memanfaatkan alam, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan ciptaan.

John Stott menegaskan bahwa mandat Tuhan tidak memberikan legitimasi bagi eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, melainkan memanggil manusia untuk menjadi pengelola yang setia atas dunia milik Tuhan.¹³⁹

Latar Belakang PSN di Papua Selatan

Kebijakan pembangunan di Papua Selatan tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar pembangunan nasional yang dalam beberapa tahun terakhir menempatkan ketahanan pangan dan kemandirian energi sebagai prioritas strategis negara. Dalam konteks tersebut, wilayah Merauke diposisikan sebagai salah satu kawasan penting yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui berbagai proyek berskala besar yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).

Secara resmi, pemerintah memandang berbagai program tersebut sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Implikasi bagi Pembangunan di Papua Selatan

Dalam konteks Papua Selatan, prinsip teologis ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan tidak harus dipertentangkan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mengembangkan ekonomi dapat dipahami sebagai bagian dari mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia.

Namun pada saat yang sama, pembangunan harus dijalankan dengan kesadaran bahwa bumi adalah milik Tuhan dan manusia hanyalah pengelola yang bertanggung jawab kepada-Nya. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta penghormatan terhadap sesama manusia yang juga merupakan gambar Tuhan.

Dengan demikian, landasan teologis Alkitab memberikan dasar bagi pembangunan yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan berorientasi pada pemeliharaan ciptaan.

Keadilan Tuhan dan Larangan Perampasan Tanah

Selain menegaskan bahwa bumi adalah milik Tuhan, Alkitab juga memberikan perhatian yang besar terhadap keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Dalam tradisi Perjanjian Lama, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari pemberian Tuhan yang berkaitan dengan identitas keluarga, keberlangsungan hidup, dan warisan bagi generasi berikutnya.

Karena itu, berbagai tindakan yang menghilangkan hak orang lain atas tanah atau merampas sumber penghidupan mereka mendapat perhatian serius dalam Alkitab.

Kisah Nabot : Penyalahgunaan Kekuasaan terhadap Hak Milik

Salah satu contoh paling jelas terdapat dalam kisah Nabot di **1 Raja-Raja 21**. Raja Ahab ingin memperoleh kebun anggur milik Nabot untuk dijadikan kebun sayur. Namun Nabot menolak menjual tanah tersebut karena tanah itu merupakan milik pusaka keluarganya (1Raj. 21:3).

Melalui rekayasa yang dilakukan Izebel, Nabot akhirnya dihukum mati dan tanahnya diambil oleh raja. Nabi Tuhan pada waktu itu kemudian datang membawa penghukuman Tuhan terhadap Ahab (1Raj. 21:17-24).

Kisah ini menunjukkan bahwa Alkitab mengecam penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan hak orang lain. Persoalan utama dalam

kisah ini bukanlah pembangunan atau perluasan wilayah, melainkan penyalahgunaan otoritas dan hilangnya keadilan.

Walter Brueggemann menegaskan bahwa tanah dalam Perjanjian Lama berkaitan erat dengan identitas, kehidupan, dan relasi perjanjian antara Tuhan dan umat-Nya.¹⁴¹

Teguran Nabi Yesaya terhadap Akumulasi Tanah

Nabi Yesaya juga menyampaikan kritik terhadap praktik akumulasi tanah yang mengabaikan keadilan sosial: "Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri!" **(Yes 5:8)**

Teguran tersebut tidak ditujukan terhadap pembangunan itu sendiri, melainkan terhadap sistem yang menyebabkan sebagian orang kehilangan ruang hidup sementara kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Para nabi Perjanjian Lama secara konsisten mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak disertai keadilan akan bertentangan dengan kehendak Tuhan.¹⁴²

Tuhan Membela Orang Lemah

Mazmur berulang kali menggambarkan Tuhan sebagai pembela mereka yang lemah dan tertindas: "Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan!" (**Mzm 82:3**)

Prinsip ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang rentan kehilangan perlindungan dan akses terhadap sumber kehidupan. Karena itu, setiap kebijakan sosial dan ekonomi seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang paling lemah.

Peringatan terhadap Kerja Paksa dan Ketidakadilan

Meskipun masa Salomo ditandai oleh berbagai keberhasilan pembangunan, Alkitab juga mencatat adanya sisi lain yang perlu diperhatikan. Untuk mendukung proyek-proyek

¹⁴¹ Walter Brueggemann, *The Land* (Minneapolis: Fortress Press, 2002), 169.

¹⁴² John Goldingay, *The Theology of the Book of Isaiah* (Downers Grove: IVP Academic, 2014), 61.

besar tersebut, Salomo memberlakukan sistem kerja rodi (forced labor) dan pungutan yang berat terhadap rakyat (1Raj. 5:13-18; 12:4).

Setelah kematian Salomo, rakyat Israel menyampaikan keluhan kepada Rehabeam:

""Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu."" (1Raj 12:4)

Ketika Rehabeam menolak mendengarkan permintaan tersebut, kerajaan Israel akhirnya terpecah menjadi dua bagian (1Raj. 12:16-20).

Kisah ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan secara material tidak selalu menjamin keberlangsungan sosial dan politik. Ketika pembangunan tidak disertai kepekaan terhadap beban yang ditanggung masyarakat, maka ketegangan sosial dapat muncul dan mengancam persatuan komunitas.

Walter Kaiser Jr. menegaskan bahwa Alkitab secara konsisten mengingatkan para pemimpin untuk tidak menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang menindas rakyat.¹⁴⁶ Dengan demikian, kritik Alkitab bukan ditujukan kepada pembangunan itu

sendiri,

melainkan kepada penggunaan kekuasaan yang mengabaikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang baik, adalah Pembangunan yang Berorientasi pada Kehidupan

Melalui perbandingan antara kisah Nabot dan Salomo, Alkitab memperlihatkan bahwa pembangunan dapat menghasilkan dua konsekuensi yang berbeda. Pembangunan yang dikelola dengan hikmat dan diarahkan bagi kesejahteraan bersama dapat menjadi sarana pemeliharaan Tuhan bagi manusia. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan keadilan dan membebani masyarakat dapat melahirkan ketegangan sosial.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan dalam perspektif Alkitab tidak semata-mata terletak pada besarnya proyek yang dibangun atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, tetapi pada sejauh mana pembangunan tersebut menghasilkan kehidupan (shalom) bagi masyarakat.

Konsep shalom dalam Alkitab tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi menunjuk pada keadaan ketika manusia hidup dalam relasi yang harmonis dengan Tuhan, sesama, dan ciptaan.¹⁴⁷ Dengan demikian, pembangunan yang sesuai dengan kehendak Tuhan

adalah pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan yang utuh, bukan hanya kemajuan material.

Implikasi bagi Pembangunan di Papua Selatan

Pelajaran dari kisah Nabot dan Salomo memberikan keseimbangan yang penting dalam menilai berbagai kebijakan pembangunan masa kini. Di satu sisi, Alkitab memberikan dasar yang positif bagi pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Upaya negara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab yang baik.

Namun di sisi lain, Alkitab juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan keadilan, partisipasi masyarakat, dan martabat manusia. Kemajuan ekonomi tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan kelompok tertentu atau mengabaikan suara masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, perspektif Alkitab tidak membawa gereja kepada sikap anti-pembangunan, tetapi mendorong gereja untuk mendukung pembangunan yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan berorientasi pada kehidupan bersama.

Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan Alkitab bukanlah apakah pembangunan perlu dilakukan atau tidak, melainkan: apakah pembangunan tersebut menghasilkan kehidupan, keadilan, dan kesejahteraan bagi manusia sebagai gambar Tuhan.

Tanah sebagai Anugerah dan Amanat Pemeliharaan Tuhan

Setelah menegaskan bahwa Alkitab tidak menolak pembangunan, tetapi mengkritik pembangunan yang tidak adil, pertanyaan berikutnya adalah: berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab, bagaimana pembangunan dapat dievaluasi secara etis?

Alkitab memang tidak memberikan model pembangunan modern secara teknis, namun Alkitab menyediakan prinsip-prinsip moral yang dapat dipakai sebagai kerangka etis dalam menilai berbagai kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip-prinsip tersebut membantu orang percaya melihat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi atau kemajuan infrastruktur, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan manusia dan ciptaan-Nya.

Pembangunan Harus Menghasilkan dan Menyelamatkan Kehidupan

Salah satu tujuan utama karya Tuhan dalam Alkitab adalah memelihara dan menopang kehidupan. Yesus sendiri berkata: "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." (Yoh 10:10)

Demikian pula, kebijakan Yusuf dalam menghadapi krisis pangan menunjukkan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menjaga keberlangsungan hidup manusia (Kej. 41:33-36).

Dengan demikian, pembangunan dalam perspektif Alkitab seharusnya berorientasi pada kehidupan (*life-giving development*), yaitu pembangunan yang: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, melindungi generasi masa depan, serta mendukung keberlangsungan hidup manusia.

John Stott menegaskan bahwa kepedulian terhadap kebutuhan manusia merupakan bagian dari panggilan orang percaya untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia.¹⁴⁸

Karena itu, pembangunan yang menghasilkan kehidupan dan kesejahteraan bersama sejalan dengan maksud Tuhan bagi ciptaan-Nya.

Prinsip Etis Pembangunan dari Perspektif Kristen

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa Alkitab tidak memberikan model pembangunan yang bersifat teknis dan seragam, tetapi menyediakan prinsip-prinsip moral yang dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan sosial pada setiap zaman. Dalam konteks Papua Selatan, berbagai dinamika yang berkaitan dengan pembangunan, hak masyarakat adat, lingkungan hidup, dan relasi antara negara dengan masyarakat lokal menuntut adanya permenungan etis yang bersifat kontekstual.

Berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab yang telah dibahas sebelumnya, serta dengan memperhatikan realitas sosial masyarakat adat Papua Selatan, bagian ini merumuskan beberapa prinsip etis pembangunan dari perspektif Kristen. Prinsip-prinsip ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi teknis kebijakan, melainkan sebagai kerangka moral yang dapat membantu gereja dan masyarakat Kristen dalam menilai serta berpartisipasi dalam proses pembangunan secara bertanggung jawab.

Pembangunan hendaknya Dilakukan Bersama Masyarakat Papua, Bukan Sekadar untuk Masyarakat Papua

Salah satu prinsip penting dalam etika Kristen adalah penghormatan terhadap manusia sebagai gambar Tuhan (*imago Dei*). Karena itu, masyarakat tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek yang menerima hasil pembangunan, tetapi sebagai subjek yang turut terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Dalam perspektif Alkitab, relasi Tuhan dengan manusia tidak dibangun melalui dominasi, melainkan melalui perjanjian, dialog, dan tanggung jawab bersama. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang baik bukan sekadar "membangun bagi masyarakat", namun "*membangun bersama masyarakat*".

Dalam konteks Papua Selatan, prinsip ini berarti bahwa masyarakat adat Papua tidak hanya dipahami sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai mitra yang memiliki pengetahuan lokal, identitas budaya, dan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan komunitas mereka.

Dengan demikian, pembangunan yang inklusif menuntut adanya hubungan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, gereja, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan energi. Namun, pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan infrastruktur, melainkan juga bersentuhan dengan ruang hidup, identitas budaya, serta keberlanjutan ekologis masyarakat adat Papua.

Film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* memperlihatkan adanya kegelisahan dan keresahan dalam pengalaman sebagian masyarakat adat terhadap perubahan yang terjadi akibat masuknya proyek-proyek berskala besar. Dalam penelitian ini, film tersebut dipahami sebagai representasi sosial yang menghadirkan perspektif tertentu terhadap pembangunan dan karenanya perlu dibaca secara kritis dan seimbang.

Secara sosiologis, dinamika yang muncul menunjukkan bahwa pembangunan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, pembangunan yang berkelanjutan perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, menghormati identitas budaya masyarakat lokal, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, serta mengedepankan dialog dan keadilan sosial. Pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kesejahteraan manusia dan keberlangsungan komunitas yang terdampak.

Dari perspektif Alkitabiah, manusia dipanggil untuk mengelola ciptaan Allah secara bertanggung jawab, menegakkan keadilan, serta memperhatikan mereka yang lemah dan rentan. Karena itu, pembangunan seharusnya dilaksanakan dalam kerangka kasih, keadilan, dan pemeliharaan terhadap ciptaan. Gereja dipanggil untuk menjalankan peran profetik dengan menghadirkan suara kebenaran, membangun perdamaian, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang menghormati martabat manusia dan mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Tuhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah, korporasi, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan perlu mengembangkan pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan menghormati martabat masyarakat adat.

Proses pengambilan keputusan hendaknya dilakukan melalui musyawarah yang bermakna, bukan sekadar formalitas administratif, sehingga masyarakat adat dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan yang berkaitan dengan ruang hidup mereka.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat perlu diwujudkan secara nyata melalui perlindungan hak atas tanah, akses terhadap informasi yang memadai, serta penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan sebagai bagian penting dari pembangunan yang menghargai hak asasi manusia.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlangsungan komunitas lokal.

Selain itu, pendekatan keamanan yang berlebihan dalam pelaksanaan pembangunan perlu diminimalkan agar ruang dialog dan kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat terbangun secara lebih sehat. Pembangunan hendaknya mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat daripada pendekatan yang berpotensi menimbulkan rasa takut, ketegangan sosial, atau konflik di tengah masyarakat.

Pemerintah dan korporasi juga *perlu menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama* melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia Papua.

Pada saat yang sama, aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan pelestarian budaya masyarakat adat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan.

Kemajuan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan upaya menjaga ekologi, melindungi hutan dan sumber-sumber kehidupan masyarakat, serta memelihara warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat adat Papua.

Gereja sebagai bagian dari masyarakat dipanggil untuk menjalankan peran profetik dengan menyuarakan keadilan, mendampingi masyarakat yang rentan, membangun rekonsiliasi, serta menjadi jembatan dialog di tengah berbagai kepentingan yang berbeda. Sementara itu, masyarakat awam maupun gereja diharapkan terus mendorong partisipasi publik, pendidikan kritis, dan advokasi yang dilakukan secara damai dan konstruktif demi terwujudnya pembangunan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.

Kepustakaan

A. Dokumen resmi, laporan, dan sumber Lembaga

AMAN. “Proyek Strategis Nasional di Tanah Papua Mendapat Sorotan Peserta Rakernas AMAN VIII.” 2024.

Badan Informasi Geospasial. *Atlas Tematik Papua*. Cibinong: BIG, 2021.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Selatan. *Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2024*.

Merauke: BPS Papua Selatan, 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Jakarta: Bappenas, 2011.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Bappenas, 2020.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Visi Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Bappenas, 2023.

Conservation International Indonesia. *Papua: The World's Richest Island Biodiversity Report*. Jakarta: CI Indonesia, 2020.

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. “Pemerintah Siapkan 2 Juta Ha Lahan untuk Swasembada Gula dan Bioetanol.” Wantimpres RI, 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan.

“Potensi Sektor Perkebunan Provinsi Papua Selatan.” Diakses 18 Juni 2026.

Food and Agriculture Organization (FAO). *Sago Palm: Multiple Contributions to Food Security and Sustainable Livelihoods*. Rome: FAO, 2018.

Forest Peoples Programme. *Papua and Indigenous Peoples' Livelihood Systems*. Moreton-in-Marsh: FPP, 2011.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. *Rencana Tata Ruang dan Potensi Pengembangan Wilayah Papua Selatan*. Jakarta: ATR/BPN, 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Blueprint Energi Nasional*. Jakarta: KESDM, 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Roadmap Bioenergi Nasional*. Jakarta: KESDM, 2023.

Kementerian Investasi/BKPM. *Laporan Investasi Nasional 2024*. Jakarta: BKPM, 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. “Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Wilayah Wanam Papua Selatan.” Diakses 18 Juni 2026.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2020.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Program Pengembangan Food Estate Nasional*. Jakarta: Kementan, 2023.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Program Pengembangan Komoditas Tebu Nasional*. Jakarta: Kementan, 2024.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024*. Jakarta: Kementan, 2020.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Strategi Ketahanan Pangan Nasional*. Jakarta: Kementan, 2023.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). *Laporan Tahunan KPPIP*. Jakarta: KPPIP, 2023.

Korpolantas Mabes Polri. “Penjelasan Pembubaran Nobar Film Pesta Babi.” April 2026.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan. *Profil Investasi Provinsi Papua Selatan*. Merauke: Pemprov Papua Selatan, 2024.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan. *Profil Provinsi Papua Selatan*. Merauke: Pemprov Papua Selatan, 2023.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan. *Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan 2023–2026*. Merauke: Pemprov Papua Selatan, 2023.

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pengembangan Bioetanol di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan*.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke." 2024.
- United Nations. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. New York: United Nations, 2007.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press, 1994.
- World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. *PSN Merauke II: Perampasan Tanah, Deforestasi, dan Ancaman Etnosida*. Briefing Paper, 2024.
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. *Proyek Strategis Nasional (PSN), Pengembangan Pangan & Energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup*. Briefing Paper, 2024.
- YLBHI. *Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pangan dan Energi Merauke Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia dan Memperparah Krisis Ekologi*. 2024.

B. Buku dan karya ilmiah

- A. A. K. Surjomihardjo. *Sejarah Sosial Daerah Merauke*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Abraham Kuyper. *Lectures on Calvinism*. Grand Rapids: Eerdmans, 1931.
- Albert M. Wolters. *Creation Regained*. Grand Rapids: Eerdmans, 2005.
- Anthony A. Hoekema. *Created in God's Image*. Grand Rapids: Eerdmans, 1986.
- Bill Nichols. *Introduction to Documentary*. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press, 2017.
- Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

- Cornelius Plantinga Jr. *Not the Way It's Supposed to Be: A Breviary of Sin*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Craig G. Bartholomew dan Michael W. Goheen. *The Drama of Scripture*. Grand Rapids: Baker Academic, 2004.
- Douglas J. Moo dan Jonathan A. Moo. *Creation Care: A Biblical Theology of the Natural World*. Grand Rapids: Zondervan Academic, 2018.
- Emile Durkheim. *The Division of Labour in Society*. Diterjemahkan oleh W. D. Halls. New York: Free Press, 1984.
- James Midgley. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications, 1995.
- James Midgley. *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage Publications, 2014.
- Jim Elmslie. *West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census*. Sydney: University of Sydney, 2017.
- Johan Galtung. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications, 1996.
- John Goldingay. *The Theology of the Book of Isaiah*. Downers Grove: IVP Academic, 2014.
- John Paul II. *Centesimus Annus*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1991.
- John Stott. *Issues Facing Christians Today*. Grand Rapids: Zondervan, 2006.
- Karl Barth. *Community, State, and Church*. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2004.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- _____. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lewis A. Coser. *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press, 1956.
- Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari. *Making FPIC Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples*. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs, 2007.
- Mansoben, Johsz F. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI Press, 1995. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. 12th ed. Boston: Pearson Education, 2015.
- Miroslav Volf. *Exclusion and Embrace*. Nashville: Abingdon Press, 1996.
- Nicholas Wolterstorff. *Justice: Rights and Wrongs*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Paulo Freire. *Pedagogy of the Oppressed. 30th Anniversary Edition*. New York: Continuum, 2000.

- Paul Robbins. *Political Ecology: A Critical Introduction*. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.
- Peter L. Berger. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Basic Books, 1974.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1966.
- Piers Blaikie dan Harold Brookfield. *Land Degradation and Society*. London: Methuen, 1987.
- Pierre Bourdieu. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
- Pierre Bourdieu. "The Forms of Capital." in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, disunting oleh John G. Richardson, 243–248. New York: Greenwood Press, 1986.
- Ralf Dahrendorf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.
- Robert Chambers. *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman, 1983.
- Roy Ellen. *Environment, Subsistence and System: The Ecology of Small-Scale Social Formations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Stephen B. Bevans. *Models of Contextual Theology*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.
- Stuart Hall, ed. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications, 1997.
- V.P. Hamilton. *The Book of Genesis Chapters 1–17*. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.
- Walter Brueggemann. *Genesis*. Atlanta: John Knox Press, 1982.
- _____. *The Land*. Minneapolis: Fortress Press, 2002.
- Walter C. Kaiser Jr. *Toward Old Testament Ethics*. Grand Rapids: Zondervan, 1983.

C. Artikel daring, siaran pers, dan materi public

- BBC News Indonesia. "Militer Dilibatkan dalam Proyek Food Estate di Merauke, Masyarakat Adat 'Ketakutan' – 'Kehadiran Tentara Begitu Besar seperti Zona Perang'." 2024.
- Jubi. "Diputar di Auckland, Film Pesta Babi Soroti Ekosida di Papua." 9 Maret 2026.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “Lumbung Pangan Merauke Terus Dikembangkan Menuju Target 1 Juta Hektar.” Diakses 18 Juni 2026.

MKRI. “Nilai Rusak Sumber Penghidupan, Warga Merauke Keluhkan PSN Program ‘Food Estate’.” Berita MKRI, 2024.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan. “Gubernur Apolo dan Ditjen Lahan dan Irigasi Tinjau Cetak Sawah di Waninggap Kai.” Diakses 18 Juni 2026.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan. “Pemprov Papua Selatan Lakukan Sosialisasi Terkait Proyek Strategis Nasional di Dua Kampung.” Suara Merauke, 2026.

Pertanian.go.id. “Lumbung Pangan Merauke Terus Dikembangkan Menuju Target 1 Juta Hektar.” Diakses 18 Juni 2026.

SAWITKU.id. “Tiga Generasi Fangiono Kuasai Tebu Hingga Sawit di Papua.” 2024.

Tempo.co. “Daftar Perusahaan Penggarap Proyek Food Estate Merauke Jokowi.” 2024.

Tempo.co. “Respons Dhandhy Laksono atas Klaim Keberatan Mama Yasinta di Pesta Babi.” 25 Mei 2026.

Watchdog Foundation. *Press Release: Pesta Babi Documentary Film Launch*. 2026.

WALHI. “Dari Merauke, Masyarakat Terdampak PSN Tolak Perampasan Tanah dan Ruang Hidup.” 14 Maret 2025.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. “PSN Pengembangan Pangan & Energi di Merauke.” 2024.

Biografi singkat:

Pdt. Ebenezer Sianturi — sedang menyelesaikan studi teologi pada Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia, Jakarta. Artikel ini adalah bagian dari karya tulis dalam rangka menempuh MK Pengantar Sosiologi. Tulisan ini tidak mencerminkan pandangan institusi manapun.